

Bupati Ungkap Sembilan Temuan BPK

Paripurna Pertanggungjawab APBD 2011

MEMPAWAH. Terdapat sembilan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Kabupaten Pontianak 2011. Sebagaimana diungkapkan Bupati Pontianak H Ria Norsan pada Paripurna Pidato Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 di DPRD, kemarin.

"Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan APBD 2011, menunjukkan adanya sembilan temuan. Lima temuan atas kepatuhan perundang-undangan dan empat temuan atas sistem pengendalian intern," ungkap Norsan.

Atas audit keuangan tersebut, jelas Norsan, BPK memberikan

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat WDP tersebut telah diterima Pemerintah Kabupaten Pontianak sejak lima tahun anggaran belakangan ini.

"Opini itu dinilai dari empat kriteria utama. Yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian intern," paparnya.

Norsan menyampaikan, opini WDP diberikan, lantaran BPK menilai laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan diungkap secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (calk).

"Hasil audit BPK ini telah diterima sejak tanggal 24 Mei 2012. Sebagaimana Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 298 ayat (1) menyebutkan kepala daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir," ujarnya.

Secara garis besar, sambung Norsan, laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten Pontianak tahun 2011 terdiri dari beberapa poin. Yakni pendapatan mencapai Rp 553,45 miliar. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp22,23 miliar.

"Kemudian, pendapatan transfer sebesar Rp524,32 miliar serta lain-lain pendapatan yang sah

sebesar Rp6,79 miliar," katanya.

Poin selanjutnya, imbuh dia yakni belanja daerah. Realisasi belanja pada APBD 2011 sebesar Rp522,02 miliar atau 89,35 persen dari anggaran belanja, setelah perubahan sebesar Rp584,25 miliar. Sehingga terjadi efisiensi belanja sebesar Rp62,23 miliar.

"Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp316,26 miliar dengan realisasi Rp298,40 miliar. Sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp17,86 miliar. Belanja langsung sebesar Rp268 miliar dan realisasinya Rp223,63 miliar," jelas Norsan.

Pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit atau mengalokasikan surplus dalam APBD. Realisasi penerimaan pem-

biayaan sebesar Rp38,37 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,51 miliar.

"Dari realisasi APBD 2011 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp68,17 miliar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan beserta anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya," papar Norsan.

Sidang Paripurna Pidato Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Rusli Abdullah dan dihadiri oleh para anggota DPRD dan Kepala SKPD beserta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak. (shn)